

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin beragam kegiatan suatu daerah maka pengelolaan Badan Keuangan pada suatu daerah dituntut untuk bekerja lebih profesional lagi. Pengelolaan tersebut memerlukan adanya system pertanggung jawaban yang baik dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pengendalian. Sinurat (2018) dalam bukunya mengemukakan bahwa kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan kinerja suatu badan keuangan daerah ditentukan oleh kemampuan dalam mentransformasikan diri sesuai dengan tuntutan perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan terbaru yang dapat mendukung kemampuan manajemen dalam menyusun rencana kerja, rencana pendapatan, dan belanja daerah, yang disusun setiap tahun secara efektif dan efisien serta adanya pengendalian operasional juga factor yang harus diperhatikan. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam usaha pembangunan juga perlu dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga pemberian otonomi dan desentralisasi di bidang keuangan perlu ditempuh agar usaha pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pernyataan pada Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. “Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada point A Mengatakan bahwa Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diatur secara menyeluruh, adil dan selaras”. Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, urusan tersebut perlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan daerah yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pentingnya untuk mengetahui Kinerja Keuangan suatu daerah karena Keuangan daerah menjadi sumber pendanaan utama bagi daerah untuk menyelenggarakan berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi. Semuanya membutuhkan pendanaan yang perlu diatur dengan baik oleh pemerintah sehingga penting untuk melihat kinerja keuangan suatu daerah.

Pada umumnya APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Dimana dalam menyusun APBD membutuhkan kas. Kas digunakan sebagai roda penggerak dari setiap kegiatan suatu daerah, sehingga kas merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena begitu pentingnya peranan kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik sumber penerimaannya maupun pengeluarannya dengan cara membuat laporan anggaran kas suatu daerah .

Menurut Rozelvi (2015) Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Menurut Syukry Abdulah (2010) Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya mengikuti pedoman dan struktur organisasi

yang berlaku di daerah tersebut. Karena anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka pelaksana fungsi tersebut bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan.

Semakin besar anggaran kas yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah maka semakin baik pula segala kegiatan di daerah tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu merencanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran kas agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu pemerintah daerah, sehingga kita dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh suatu pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang buruk akan menjadi permasalahan yang berdampak pada kegiatan dari suatu daerah. Untuk mengukur kinerja keuangan dari suatu pemerintah daerah maka digunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak keuangan daerah, rasio keserasian yang mencakup rasio belanja operasi dan rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan.

Kabupaten Lembata adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah otonomi yang terdiri dari 9 kecamatan. Kabupaten Lembata juga memiliki sumber pendapatan yang potensial untuk dioptimalkan pemberdayaannya. Sebagai kabupaten, Lembata memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan pendapatan daerah yaitu : 1). PAD yang terdiri dari pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2). Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil

Pajak/Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi.

Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata memerlukan pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis transparan dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran kas daerah yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik yang akan meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan pembangunan di daerah Lembata masih terbilang berjalan lambat karena ditinjau dari pengadaan infrastruktur yang belum merata, serta aspek lainnya yang masih kurang dari kata baik. Oleh karena itu melalui laporan anggaran kas dapat diketahui bagai mana pemerintah daerah mengelola kas yang dimiliki untuk mengukur kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten Lembata dengan menggunakan analisis rasio sebagai alat pengukurannya.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS ANGGARAN KAS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Anggaran Kas Dapat Digunakan Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata ?

1.3.Tujuan penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Penggunaan Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian untuk mengukur kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.

1.4.2. Manfaat Praktisi

Bagi pemerintah daerah kabupaten lembata diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian untuk mengukur kinerja keuangan dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

